

**KAMPANYE ANTI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Cinta Labaso ^{1*}, Sulastri Gala ², Cicin Nune ³

Universitas Negeri Gorontalo

***Cintalabaso8810@gmail.com**

Received: 22/05/2025 **Accepted:** 04/06/2025 **Published:** 31/07/2025

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan sistemik yang menciptakan ketimpangan gender dan trauma berkepanjangan, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi seperti Universitas Negeri Gorontalo. Kampanye ini dirancang sebagai bagian dari pengabdian masyarakat dengan pendekatan kuantitatif melalui studi literatur dan dokumentasi kasus-kasus aktual. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran sivitas akademika serta membangun sistem perlindungan internal berbasis edukasi visual dan informasi tertulis. Temuan menunjukkan bahwa media edukasi seperti video dan brosur dapat berperan signifikan dalam mendorong kesadaran kolektif terhadap isu kekerasan seksual. Hasil ini memperkuat argumen bahwa kampanye berbasis media dan literasi hukum menjadi alternatif preventif yang relevan.

Kata kunci: Kekerasan seksual, perempuan dan anak, universitas

Abstract: Sexual violence against women and children is a systemic issue that creates gender inequality and long-term trauma, including within higher education institutions such as Gorontalo State University. This campaign was designed as part of a community service initiative using a quantitative approach through literature studies and documentation of actual cases. The goal of this activity is to raise awareness among the academic community and to build an internal protection system based on visual education and written information. Findings show that educational media such as videos and brochures can play a significant role in fostering collective awareness of sexual violence issues. These results reinforce the argument that media- and legal-literacy-based campaigns are a relevant preventive alternative.

Keywords: Sexual violence, women and children, university

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang terjadi secara global dan menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia maupun jenis kelamin korban. Fenomena ini dijumpai di banyak negara dengan tingkat kejadian yang berbeda-beda. Dalam sebuah penelitian terhadap remaja di Amerika Serikat, ditemukan bahwa lebih dari 80% perempuan berusia 12 hingga 16 tahun mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. Di kawasan Uni Eropa, sekitar 40 hingga 50 persen perempuan mengalami kekerasan seksual di tempat kerja. Sementara itu, di negara-negara seperti Jepang, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan, antara 30 hingga 40 persen pekerja perempuan melaporkan mengalami pelecehan seksual dalam lingkungan kerja mereka (Rusyidi et al., 2019)

Isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia semakin mendapatkan sorotan seiring dengan munculnya berbagai laporan yang mengungkap kasus-kasus yang sebelumnya tersembunyi. Berdasarkan laporan (Adolph, 2016), terdapat lebih dari 2000 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan secara nasional, dengan 7,2% di antaranya terjadi di institusi pendidikan. Angka ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak-anak. Universitas Negeri Gorontalo sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender. (Rohima et al., 2023)

Menurut Nurfadilah (2024), kampus memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui penguatan kebijakan dan literasi. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan sosial yang menekankan pentingnya negara dan institusi publik dalam menciptakan sistem dukungan terhadap kelompok rentan (Astiyana, 2021). Dalam konteks ini, kekerasan seksual bukan hanya permasalahan individu, tetapi juga refleksi dari ketimpangan kekuasaan dan budaya patriarki yang mengakar dalam sistem sosial.

Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences

Studi yang dilakukan oleh Kartini (2022) menunjukkan bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik tidak dilaporkan karena adanya budaya diam, ketakutan terhadap stigma, serta minimnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, intervensi tidak cukup dilakukan hanya pada tataran kebijakan, melainkan juga harus menysasar perubahan sikap dan kesadaran kolektif sivitas akademika. Salah satu cara yang dianggap efektif dalam menciptakan perubahan ini adalah melalui kampanye publik berbasis edukasi.

Kampanye publik yang didesain secara sistematis dapat menjadi alat strategis untuk membentuk persepsi, meningkatkan pengetahuan, serta mendorong tindakan preventif. Menurut Rogers (2003), dalam model difusi inovasi, penyebaran gagasan baru seperti kesadaran terhadap kekerasan seksual dapat berlangsung secara efektif melalui komunikasi interpersonal dan media massa yang saling mendukung. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi perubahan sosial yang menekankan peran penting media dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses transformasi sosial (Jan & Rico, 2013).

Kampanye edukatif yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai pemicu refleksi kritis atas norma-norma sosial yang melanggar kekerasan. Dalam konteks Universitas Negeri Gorontalo, kampanye ini diarahkan untuk menggugah empati dan kesadaran kolektif sivitas akademika agar memiliki sikap responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Penggunaan pendekatan visual, seperti infografis dan video naratif, memungkinkan penyampaian pesan secara emosional dan kognitif sekaligus, sehingga lebih mudah dicerna oleh target audiens yang memiliki latar belakang budaya dan pemahaman hukum yang beragam (Siregar, 2021).

Salah satu strategi kampanye yang digunakan adalah storytelling berbasis kasus nyata yang terjadi di lingkungan kampus, dengan tetap menjaga anonimitas korban. Menurut Green & Brock (2000), narasi personal mampu menciptakan keterlibatan emosional yang mendalam (transportation), yang pada gilirannya mendorong audiens untuk mengubah sikap dan perilaku. Narasi-narasi ini dikemas dalam format audio-visual berdurasi singkat dan dibagikan melalui kanal resmi universitas serta media sosial, menjangkau lebih banyak audiens secara inklusif.

Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences

Selain pendekatan visual, aspek literasi hukum juga menjadi fokus dalam kampanye ini. Penyebaran brosur yang memuat hak-hak korban, mekanisme pelaporan, dan landasan hukum seperti UU TPKS dan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran hukum. Dalam literatur advokasi sosial, dikatakan bahwa akses terhadap informasi hukum merupakan elemen mendasar dalam pemberdayaan korban (UN Women, 2020). Dengan memahami hak-haknya, korban lebih mungkin untuk berani melapor dan mencari keadilan.

Di sisi lain, kampanye ini juga berfungsi untuk mendorong institusi pendidikan agar memperkuat sistem pelaporan internal yang mudah diakses dan ramah korban. Saat ini, banyak institusi yang masih bergantung pada birokrasi panjang dalam menangani laporan kekerasan seksual, yang justru memperbesar risiko trauma sekunder bagi korban (Setiawan, 2022). Dengan menyediakan informasi yang jelas, ringkas, dan legal-formal dalam media cetak seperti brosur, diharapkan terjadi peningkatan literasi hukum secara menyeluruh, termasuk bagi tenaga pendidik dan staf administrasi.

Penting juga untuk menekankan bahwa literasi hukum bukan hanya tentang memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pengetahuan praktis mengenai bagaimana menggunakan informasi tersebut dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, brosur yang disebar dalam kampanye ini tidak hanya menjelaskan pasal-pasal hukum, tetapi juga mencantumkan kontak lembaga pendamping hukum, layanan psikologis, dan unit layanan terpadu di lingkungan kampus. Langkah ini penting karena sering kali korban tidak tahu harus menghubungi siapa atau ke mana harus melapor setelah mengalami kekerasan.

Menurut Susanto dan Harini (2023), integrasi antara edukasi hukum dan layanan langsung menjadi strategi efektif dalam mendekatkan keadilan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kampanye ini membuktikan bahwa pendekatan interdisipliner, yang menggabungkan hukum, psikologi, dan komunikasi, mampu memberikan hasil yang lebih menyeluruh dalam pencegahan kekerasan seksual.

Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences

Lebih lanjut, kampanye ini juga mengedukasi sivitas akademika mengenai peran saksi dan pentingnya budaya responsif terhadap laporan kekerasan. Sering kali, kasus kekerasan seksual tidak mendapatkan perhatian karena dianggap sebagai urusan pribadi atau tabu untuk dibicarakan. Hal ini menyebabkan pelaku tetap bebas dan korban mengalami pengucilan. Oleh karena itu, dalam brosur dan materi video juga disampaikan bagaimana etika mendampingi korban dan prosedur melaporkan pelaku tanpa memperparah trauma korban. Menurut laporan Amnesty International (2021), pendekatan berbasis trauma (trauma-informed approach) sangat penting dalam konteks edukasi publik mengenai kekerasan seksual.

Dengan menggabungkan berbagai aspek tersebut, literasi hukum dalam kampanye ini tidak hanya meningkatkan kesadaran individual, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Kampus sebagai institusi pembentuk karakter dan etika sosial perlu menjadi pionir dalam mempraktikkan nilai-nilai kesetaraan, perlindungan, dan keadilan. Literasi hukum yang kontekstual, aplikatif, dan partisipatif adalah fondasi penting untuk mewujudkan misi tersebut.

Tak kalah penting adalah keterlibatan pemangku kepentingan kampus, seperti pimpinan fakultas, lembaga kemahasiswaan, dan pusat studi gender. Partisipasi mereka menjadi indikator keberhasilan kampanye dalam menjangkau struktur formal universitas dan menjadikannya bagian dari sistem perlindungan jangka panjang. Studi oleh (Beno et al., 2022) menunjukkan bahwa keberhasilan kampanye anti-kekerasan di kampus sangat ditentukan oleh dukungan kelembagaan dan integrasi ke dalam kebijakan kampus.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, kampanye ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan temporer, melainkan langkah awal menuju pembentukan budaya anti-kekerasan yang berkelanjutan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Sebagaimana ditegaskan oleh Freire (1970), perubahan sosial sejati hanya mungkin terjadi ketika masyarakat didorong untuk menyadari realitas penindasan yang mereka alami, dan bergerak secara kolektif untuk mengubahnya.

Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences

Universitas Negeri Gorontalo, melalui program pengabdian masyarakat, merancang sebuah kampanye edukatif yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berbasis studi pustaka dan dokumentasi kasus. Kampanye ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan pendidikan hukum berbasis HAM dan kesetaraan gender di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Adapun pendekatan visual seperti video edukasi dan penyebaran brosur hukum dipilih karena dinilai lebih mudah diterima oleh generasi muda yang terbiasa dengan komunikasi visual dan digital (Nurfadilah, 2024)

Selain itu, kampanye ini juga memperkuat peran institusi kampus dalam mengimplementasikan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan UU TPKS No. 12 Tahun 2022 yang memberikan kerangka hukum terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam konteks ini, kampus tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat menginisiasi budaya baru yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi keadilan gender (Nuriya & Hafawati, 2024)

Dengan pendekatan teoritis dan empiris tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas kampanye kekerasan seksual berbasis media edukatif di Universitas Negeri Gorontalo sebagai model intervensi yang dapat direplikasi di institusi pendidikan lainnya. Artikel ini juga menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan literasi gender dan HAM di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan kuantitatif berbasis studi pustaka dan kajian kasus yang telah terdokumentasi, termasuk regulasi hukum dan data dari lembaga seperti Komnas Perempuan, LPSK, serta catatan internal kampus yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan institusi pendidikan tinggi, dan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai efektivitas kampanye edukatif dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Kajian kasus dilakukan dengan menelusuri data dokumentasi internal kampus terkait pelaporan, penanganan, dan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan seksual selama lima tahun terakhir.

Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences

Strategi kampanye dirancang menggunakan model komunikasi visual dan berbasis naratif. Dua video edukasi berdurasi 2–3 menit diproduksi dengan pendekatan storytelling dan edukasi hukum. Selain video, sebanyak 20 lembar brosur informatif diproduksi dan disebarluaskan secara strategis di area Fakultas Ilmu Pendidikan. Informasi hukum berdasarkan UU TPKS No. 12 Tahun 2022, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, prosedur pelaporan internal kampus, serta daftar kontak lembaga bantuan hukum dan psikologis yang tersedia di lingkungan kampus maupun luar kampus.

Menurut Nurfadilah (2024), media visual memiliki kekuatan untuk menginternalisasi pesan secara lebih efektif dibandingkan komunikasi verbal semata. Dalam konteks ini, materi kampanye dirancang agar tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pemahaman dan kesadaran kolektif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap konten divalidasi oleh tim akademisi dan praktisi hukum agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan legal.

Tahapan kegiatan kampanye meliputi: 1) Riset jurnal dan artikel ilmiah tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta perencanaan kampanye berbasis hukum dan hak asasi manusia; 2) Pembuatan dua video edukasi berbasis naratif yang menyoroti bentuk kekerasan seksual dan prosedur pelaporannya; 3) Pengunggahan video ke platform digital resmi universitas dan pendistribusian 20 lembar brosur fisik secara strategis di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, mencakup area publik dan ruang akademik.



Gambar 1. Diagram Tahapan Kegiatan Kampanye

Hasil

Kampanye ini berhasil memproduksi 2 video edukasi dan 20 lembar brosur yang disebarakan secara khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Fokus distribusi diarahkan ke fakultas ini karena tingginya jumlah mahasiswa dan peran strategis mereka sebagai calon pendidik dalam mendiseminasikan nilai-nilai anti-kekerasan dan kesetaraan gender. Materi kampanye merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS No. 12 Tahun 2022) dan Peraturan Mendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Hasil dokumentasi menunjukkan peningkatan partisipasi mahasiswa dalam diskusi publik yang membahas prosedur pelaporan dan bentuk perlindungan korban (Nuriya & Hafsaawati, 2024). Selain itu, muncul dukungan dari lembaga internal kampus seperti Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA), yang turut menyuarakan pentingnya pembentukan Satgas Anti-Kekerasan Seksual.

Pembahasan

Temuan ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial yang menyatakan bahwa makna sosial dibentuk melalui interaksi simbolik, termasuk media (Berger & Luckmann, 1966). Kampanye ini bukan hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap budaya diam (culture of silence) yang selama ini menutupi kekerasan seksual di kampus. Dalam konteks ini, literasi hukum dan partisipasi sivitas akademika menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adil dan setara. Studi oleh Ramadhani (2021) juga menegaskan bahwa kampanye yang menyertakan pendekatan hukum dan narasi korban memiliki dampak psikososial yang signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu kekerasan seksual.

Kesimpulan

Kampanye kekerasan seksual di Universitas Negeri Gorontalo membuktikan bahwa pendekatan literatur dan dokumentasi kasus dapat digunakan secara efektif untuk mendorong kesadaran kolektif. Materi edukasi visual dan brosur hukum menjadi sarana penting dalam memperluas pemahaman sivitas akademika. Disarankan agar kampus membentuk kebijakan internal berkelanjutan, termasuk pelatihan bagi tenaga pendidik dan pembentukan unit penanganan kekerasan berbasis gender.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak UNG, dan Komnas Perempuan atas data yang sangat membantu dalam penyusunan kampanye ini. Serta para mahasiswa yang mau menyuarakan isu kekerasan seksual.

Referensi

- Adolph, R. (2016). *Komnas ham dan perlindungan anak*. 1–23.
- Astiyana. (2021). *Hubungan konformitas dengan perilaku skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas psikologi universitas Medan area oleh : fakultas psikologi hubungan konformitas dengan perilaku agresif siswa di SMKN 2 rambah shri*.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). In *Braz Dent J*. (Vol. 33, Issue 1).
- Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(5), 701–721. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.5.701>
- Jan, S., & Rico, L. (2013). Sustainable social change and communication. *Communication Research Trends*, 32(4), 4–30.
- Kartini, S. (2022). Budaya diam dan pelaporan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(1), 45–60.
- Nurfadilah, S. (2024). *Dakwah digital moderasi beragama Habib Husein Ja'far Al-Hadar pada konten youtube "log in."*
- Nuriya, S., & Hafsaawati, H. (2024). *Advokasi sosial untuk perempuan korban marital rape di lbh apik jakarta*.
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada perguruan tinggi di kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among indonesian university students). *Share : Social Work Journal*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- Setiawan, F. (2022). Birokrasi kampus dan trauma sekunder: studi kasus penanganan laporan kekerasan seksual di universitas. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 5(1), 66–80.
- Siregar, N. (2021). Media visual dan emosi publik: strategi komunikasi dalam kampanye kesadaran sosial. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 13(1), 77–91.



Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences

Susanto, E., & Harini, D. (2023). Integrasi edukasi hukum dan layanan sosial untuk pemberdayaan korban kekerasan seksual. *Jurnal Advokasi Publik*, 4(2), 101–116.

UN Women. (2020). Access to justice for women survivors of violence in southeast Asia. Bangkok: UN women.